Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan (Bop Smk)
(Studi Kasus : Pada Smk Negeri 1 Jatiroto Kabupaten Wonogiri Tahun 2018)

Novita Nelawati
16010026
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri Surakarta

ABSTRAK

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian pengawasan atau pengendalian. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) adalah bagian dari dana pendidikan untuk kegiatan operasional satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan yaitu biaya operasional sekolah. Hal ini sejalan dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berusia sekolah wajib mendapatkan pendidikan. Konsekuensi logis pernyataan di atas dan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.Tujuan diadakan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMK Negeri 1 Jatiroto. Hasil dari penelitian ini penggunaan dana BOP pada SMK N 1 Jatiroto terserap 100% dan tidak ada penyimpangan. Apabila ada sisa dalam buku rekening itu merupakan bunga bank dan dana pembukaan rekening, jadi uang tersebut harus disetorkan kembali ke Dinas Pendidikan untuk bunga bank, serta pembukaan rekening harus diambil atau dinolkan, karena pada tahun anggaran 2019 sisa dana pada buku rekening harus Rp. 0 (nol).

Kata Kunci :ManajemenKeuangan, BOP, SMK

ABSTRACK

Financial management is one of the substance of school management that will also determine the course of educational activities in schools. As happened in the substance of education management in general, financial management activities are carried out through the processes of planning, organizing, directing, coordinating supervision or control. Operational Cost of Education Organization (BOP) is part of the education fund for the operational activities of the education unit so that educational activities can take place according to national standards of education regularly and continuously, namely the operational costs of the school. This is in line with Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System which mandates that every citizen of school age must obtain education. The logical consequence of the above statement and to improve the quality of education implementation in the State School Education Unit and the State Special Education Unit, the Regional Government allocates the Operational Cost of Education Implementation (BOP) sourced from the Central Java Province Regional Budget in 2018. The purpose of this research is to analyze the management Operational Costs for the

Implementation of Education at SMK 1 Jatiroto. The results of this study the use of BOP funds in SMK N 1 Jatiroto is absorbed 100% and there are no deviations. If there is left over in the account book is bank interest and account opening funds, so the money must be deposited back to the Education Office for bank interest, and account opening funds must be taken or denied, because in fiscal year 2019 the remaining funds in the account book must be Rp. 0 (zero).

Keyword : Financial management, BOP, SMK

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki aktivitas yang sangat besar yang berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang ataupun negaranya. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya tujuan pendidikan harus tercapai dengan baik. Untuk mencapai tujuan pendidikan tidak lepas dari kegiatan Administrasi Pendidikan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian pengawasan atau pengendalian. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) adalah bagian dari dana pendidikan untuk kegiatan operasional satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan yaitu biaya operasional sekolah.

Hal ini sejalan dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berusia sekolah wajib mendapatkan pendidikan atas dasar amanat tersebut maka pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin kepastian bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa deskriptif pada Satuan Pendidikan Sekolah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri.

Program BOP diharapkan dapat dikelola sesuai dengan asas Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah,

dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Oleh kerena itu dalam pengelolaan dana BOS sekolah dituntut untuk mengembangkan pengelolaan dana secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Penelitian mengenai analisis pengelolaan keuangan BOP di sekolah saat ini masih jarang dilakukan. Sesuai dengan penjabaran mengenai managemen pengelolaan BOP di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan(BOP SMK) Studi Kasus : Pada SMK Negeri 1 Jatiroto, Kabupaten Wonogiri Tahun 2018."

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMK Negeri 1 Jatiroto meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada SMK Negeri 1 Jatiroto meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat terlihat berbagai permasalahan yang timbul. Berbagai masalah yang timbul yang terdapat pada rumusan masalah, maka sulit bagi peniliti untuk melakukan penelitian yang mencakup semua masalah yang ditemukan. Agar permasalahan yang diteliti dapat terfokus dan tidak menjangkau terlalu luas, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pengelolaan dana BOP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana BOP di salah satu Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) yang dekat dengan domisili rumah tinggal penulis, yaitu SMK Negeri 1 Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri.

2. Kajian Teori

2.1 Analisis Pengelolaan Kebijakan

a. Pengertian Analisis

Analisis merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan suatu kebijakan. Analisis digunakan untuk menentukan tolak ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan dan penentuan suatu kebijakan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan.

b. Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang memiliki sifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang bisa mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru didalam masyarakat.

c. Kebijakan Publik

pola tindakan yang diterapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Dari definisi tersebut terdapat tiga karakter utama kebijakan publik yaitu tujuan kebijakan publik adalah menyelesaikan masalah publik, kebijakan publik sebagai pola tindakan yang terjabarkan dalam program dan kegiatan, serta setiap kebijakan publik selalu termuat dalam hukum positif. Salah satu kebijakan publik yang diterapkan di Indonesia adalah kebijakan tentang pendidikan.

d. Konsep Analisis Kebijakan

1) Pengertian analisis kebijakan
2) Fungsi analisis kebijakan
3) Level analisis kebijakan
4) Prosedur analisis kebijakan
5) Analisis pengelolaan

2.2 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP)

a. Dasar Hukum

b. Pengertian Anggaran BOP

Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) adalah bagian dari dana pendidikan untuk kegiatan operasional satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan yaitu biaya operasional sekolah.

c. Tujuan BOP

Tujuan BOP Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menegah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Tahun 2018 adalah:

1. Membantu Pemenuhan kebutuhan pembiayaan operasional pengelolaan Satuan Pendidikan Menegah Negeri dan satuan Pendidikan Khusus Negeri.
2. Meminimalisir beban biaya operasional sekolah yang ditanggung oleh masyarakat.
3. Mendorong terwujudnya Satuan Pendidikan Menegah Negeri dan satuan Pendidikan Khusus Negeri murah dan berkualitas di Jawa Tengah yang berpotensi meningkatkan APK dan memenuhi standar Nasional Pendidikan (SNP).

d. Sasaran BOP

Sasaran Penerima BOP Pendidikan adalah seluruh Satuan Pendidikan Menegah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

e. Hasil yang diharapkan

1) Terbantunya sekolah untuk meringankan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.
2) Terwujudnya Keberpihakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
3) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik di Satuan Pendidikan Menegah Negeri dan satuan Pendidikan Khusus Negeri.

f. Satuan Biaya BOP

Satuan biaya ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah pserta didik dengan satuan biaya Satuan Pendidikan Menegah Negeri

dan satuan Pendidikan Khusus Negeri masing – masing sebesar Rp 765.000.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) / peserta didik / tahun.

g. Pelaksanaan BOP SMK

Pelaksanaan pemberian BOP Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menegah Negeri dan satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Jawa Tengah melibatkan beberapa unsur pelaksanaan.

2.3 Kerangka Berpikir

Untuk lebih detailnya maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar skema kerangka pemikiran berikut:

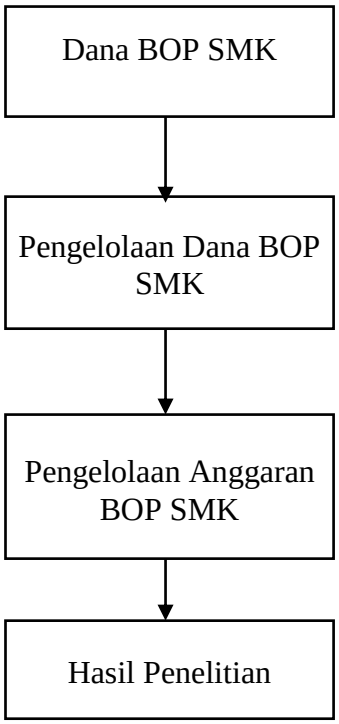

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskripsi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi yang hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Jatiroto yang beralamat di Jl. Raya Janggan, Jatiroto Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tim pengelola BOP, komite sekolah dan wali murid SMK Negeri 1 Jatiroto. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditinjau prinsip pengelolaan dana BOP berdasarkan Petunjuk Teknis BOP SMK 2018.

4. Analisis Data

4.1 Pengelolaan Dana BOP SMK Negeri 1 Jatiroto

4.1.1 Perencanaan BOP

Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOP diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Dengan begitu, sekolah harus menyusun perencanaan untuk bisa mencairkan dana BOP dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan serangkaian proses. Adapun prosesnya yakni Kepala Sekolah melakukan koordinasi melalui rapat guna membentuk team management sekolah. Team tersebut mengundang pemangku anggaran, guru, kaprodi, pembina ekstra, untuk mengajukan anggaran masing-masing pos selama 1 tahun.

Setelah melalui proses tersebut, diperoleh data perencanaan anggaran BOP SMK Negeri 1 Jatiroto selama 1 tahun anggaran berupa Rincian Anggaran Belanja (RAB) masing-masing pos yang kemudian dijadikan satu file data RAB secara utuh.

4.1.2 Pelaksanaan BOP SMK

Prinsip pelaksanaan pengelolaan dana BOP SMK Negeri 1 Jatiroto perlu mendapat perhatian yang lebih, karena dampak yang terjadi dari program dan BOS berpengaruh terhadap kesejahteraan murid-murid serta orang tua.

a. Swakelola dan Partisipasif

Prinsip swakelola merupakan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh instansi pemerintah penanggung jawab anggaran. Instansi pemerintah lainnya atau oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan prinsip partisipatif adalah melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Transparan

Bahwa pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program. Prinsip transparan dalam program pelaksanaan dana BOP di SMK Negeri 1 Jatiroto sudah berjalan dengan baik karena pelaksanaan sosialisasi program dana BOP kepada orang tua siswa sudah diinformasikan secara merata. Pihak sekolah juga sudah menyediakan tempat pengaduan dan penanganan masalah pengaduan sehingga warga sekolah tidak kesulitan untuk menyampaikan permasalahan jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan danaanggaran BOP.

4.1.3 Evaluasi dan Pelaporan Dana BOP SMK Negeri 1 Jatiroto

Pada program dana BOP yang telah dilaksanakan oleh sekolah dalam prinsip tertib administrasi dan pelaporan yang sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik dalam faktor sikap pelaksana kebijakan dimana implementasi kebijakan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan tentu tidak lepas dari sikap pelaksana. Implementasi kebijakan akan berjalan apabila pelaksana mengetahui betul apa yang akan dilaksanakan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemampuan yang dimiliki adalah merupakan kekuatan persepsi yang sesuai dengan ketentuan- ketentuan di

antara petugas mengenai standar dan tujuan kebijakan yang bersangkutan. Sekolah yang menerima dana harus menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.

SMK Negeri 1 Jatiroto yang merupakan salah satu sekolah penerima dana BOP SMK dalam prinsip tertib administrasi dan pelaporan harus melaporkan semua kegiatan secara tepat waktu dalam anggaran dana BOP. Selain itu salah satu staff yaitu staff keuangan wajib membuat Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RKAS) maupun rincian penggunaan BOP dengan membuat pembukuan baik secara administratif maupun pelaporan meliputi buku kas umum, buku kas pembantu bank, bukti pengeluaran dana BOS, laporan ringkas dan lain-lain. Evaluasi dan Pelaporan Dana BOP SMK Negeri 1 Jatiroto dilakukan setiap akhir triwulan guna memilah kembali dana yang telah terealisasi pada triwulan sebelumnya dan yang akan diajukan lagi pada pengajuan triwulan berikutnya.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan dari awal, sesuai maksud dan tujuan peneliti yakni pengelolaan dana Biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di SMK Negeri 1 Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada temuan yang menyimpang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan penggunaan biaya BOP. Hal ini dinyatakan dipembahasan serta sudah dilampirkan data pengajuan dan penerimaan, bahwasannya antara pengajuan dan jumlah dana yang diterima terserap 100% dengan baik dan transparan.

Dengan demikian analisis perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan dana BOP SMK Negeri 1 Jatiroto yang peneliti lakukan tidak menemui kendala dikarenakan data yang diperoleh sudah komplit dari pengajuan sampai laporan pertanggung

jawaban dengan data pendukung yang sudah terlampir.

5.2 Saran

Subjek dan objek penelitan yang peneliti ambil untuk bahan penelitian ini yaitu dana BOP di SMK Negeri 1 Jatiroto sudah baik serta tertata secara runtut, namun tidak ada salahnya apabila segala bentuk pelaporan bahkan pelayanan pengaduan dimaksimalkan lagi supaya semua aspek sekolah termasuk wali siswa benar-benar terlayani dengan lebih baik dan lebih transparan.

Daftar Pustaka

AndhikaPuspita Sari (2018). *Pengelolaan Keuangan Sekolah Dan Upaya Perbaikan Sistem Manajemen Keuangan di TK Gaya Baru III Jebres.Skripsi* Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Anonim. (2012). *Program Bantuan Operasional Sekolan (BOS*). http://bos.kemdikbud.go.id/home/about, diakses tanggal 9 Desember 2019.

Arief Widodo, *Pratama. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pendidikan*. *Jurnal Ilmiah.* 2012.

Bastian, Indra. *AKUNTANSI PENDIDIKAN Pengelolaan Organisasi Pendidikan*Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia PusatBahasa.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

E.S. Quade (dalam Dunn 2000: 95)

Fattah, N. (2009). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hall, James A. (2007). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta, Salemba Empat. Indraswuri, Ines Desti.

Heru Winarsih (2019). *Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (Bop) Pada Kelompok Bermain Ceria Kota*

Semarang. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/B75B712804CAF76536C7

https://www.academia.edu/36144260/Juknis_BOP_Tahun_2018.pdf

Ibnu Rochman (2016). *Strategi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Mengoptimalkan Media Pembelajaran Di SMP N 1 Pajangan Bantul Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi.* Universitas Sunan Kalijaga

.

JunitaMahtuah (2018). *Skripsi* yang berjudul*"Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paud (Boppaud) Di Desa Muara Penimbung Ulu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018".*

Komaruddin (2001:53)

Loina Lalolo Krina P. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi.* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

M Manullang. (2005). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Malayu Hasibuan SP. (2007). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah.* Jakarta: Hajimasagung.

Muchlis Hamdi (2014: 121)

Mulyono. (2010). Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Purwanti (2013). Perancangan Sistem Pendanaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Untuk SMPN Dan MTsN Berbasis Website.